

Demokrasi dalam Kehidupan Budaya

Usman PELLY

DEWASA ini kita menghadapi sebuah kewajiban kembar: yaitu melestarikan warisan budaya bangsa yang kaya dan membangun kebudayaan nasional yang modern. Seharusnya demokratisasi dalam kehidupan budaya diletakkan dalam konteks kewajiban kembar ini. Oleh karena itu, demokratisasi tidak mungkin dilihat sebagai sistem tersendiri yang otonom dan steril, baik dari usaha pelestarian warisan budaya maupun dari pembangunan budaya nasional. Sebab muara dari kedua usaha ini adalah masyarakat modern yang tipikal Indonesia, masyarakat yang tidak hanya mampu membangun dirinya sederajat dengan bangsa modern lainnya, tetapi juga tangguh menghadapi tantangan kemerosotan mutu lingkungan hidup akibat arus ilmu dan teknologi modern maupun menghadapi *trend* global yang membawa daya tarik kuat ke arah pola hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Demikian-

lah, demokratisasi kehidupan budaya berarti kebebasan dalam keterikatan untuk melaksanakan tugas kembar di atas.

Pelestarian warisan *budaya bangsa* adalah bukan obsesi untuk menghantarkan kembali masyarakat kita ke koridor sejarah masa lalu atau menemukan masa silam itu, melainkan usaha untuk menemukan identitas dirinya sendiri. Bahwa dia bukan suatu bangsa yang lahir dari serpihan *kebudayaan manusia*, tetapi dari suatu *muara budaya* yang pernah mengukir sejarah peradaban *bangsa-bangsa* di dunia. Keyakinan historis ini secara psikologis tidak hanya akan memberikan kebanggaan, tetapi juga kesetiaan untuk memelihara dan merekayasa nilai-nilai luhur dan tradisi besar bangsanya.

Itu berarti kebudayaan nasional yang dibangun harus mampu berfungsi sebagai instrumen yang mengakomodasikan masa kini, dan membuka pintu masa depan. Oleh karena itu, sudah pada tempatnya untuk menggarisbawahi keterkaitan kita dengan warisan budaya masa silam dalam mem-

Makalah ini telah disampaikan pada Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial 1990 dan Kongres VI Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) tanggal 16-21 Juli 1991 di Yogyakarta.

bangun kebudayaan nasional di masa depan. Dengan kata lain, keterkaitan itu tidak untuk mengembangkan suatu *parochialism* (*kejumutan*), atau *obsolescence* (tembok yang membendung arus informasi dunia), tetapi untuk mendapatkan jati diri dan kearifan masa silam yang diperlukan. Demikianlah, nilai baru yang masuk secara selektif atau kreativitas dan ketajaman intelektual yang muncul dari proses pembudayaan itu akan merupakan unsur inovatif kuat dalam masyarakat yang telah memiliki kepribadian dan identitas *sendiri*. Satu-satunya sistem yang dapat melakukan tugas kembar itu ialah demokratisasi.

Pengertian "demokratisasi" dan "budaya" mungkin merupakan dua pengertian yang paling banyak didefinisikan dan diberi penjelasan dalam ilmu-ilmu sosial. Bukan hanya karena kedua kata itu mengandung konsep yang penting dan vital dalam kehidupan kita, melainkan juga karena hampir semua orang yang merasa diri pakar di bidang atau berkepentingan dengan kedua kata itu terdorong membuat definisi sendiri. Apabila Sutan Takdir Alisyahbana pernah mengeluh, bahwa dalam masyarakat kita tidak ada pengertian yang lebih kacau, atau sekurang-kurangnya lebih kabur dan menggelirukan daripada pengertian kebudayaan (Alisyahbana, 1985:141), maka demikian juga dengan pengertian demokrasi.

Walaupun demokrasi pada dasarnya adalah suatu konsep politik, tetapi dipergunakan juga dalam pengertian filosofis untuk menunjukkan sesuatu yang melekat erat (*inherent*) pada pengertian persamaan, kebebasan untuk mendapatkan manfaat, dan hak-hak azasi manusia (Theodorson, 1969: 107).

Apabila proses demokratis digunakan dalam skala yang lebih luas, seperti dalam

kaitan pembentukan kebudayaan nasional, maka menurut Dahl (1985:1) lembaga-lembaga masyarakat yang otonom pasti terwujud. Menurut sosiolog ini otonomi yang dinikmati di samping merupakan konsekuensi langsung dari proses demokratisasi, juga merupakan bukti penting dari berfungsinya proses demokratisasi itu sendiri. Dengan otonomi tersebut campur tangan dan tekanan dari pemerintah dan pihak luar dapat diperkecil, dan kebebasan untuk menjalankan program yang diinginkan dapat ditingkatkan. Tetapi, kebebasan dan otonomi sebagai buah dari demokratisasi akan memberikan peluang pula untuk melancarkan destruksi, melestarikan egoisme sempit, mengorbankan kepentingan umum, dan mungkin juga menghancurkan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu Dahl mengingatkan kita, bahwa semua bentuk demokrasi akan selalu diancam oleh dilema antara otonomi dan kontrol. Dilema ini dalam negara yang diperintah oleh regim otoriter lebih terlindung ketimbang dalam negara demokratis yang maju.

Pasal 32 UUD '45 menyatakan bahwa: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia." Pasal ini mengisyaratkan bahwa masalah kebudayaan nasional merupakan masalah kenegaraan, sehingga perlu ditangani dan dikoordinasikan lewat pemerintah (Subadio, 1988:5). Itu berarti pemerintahan di Indonesia berdasarkan undang-undang, secara legal dan terbuka, memiliki hak kontrol terhadap perkembangan kehidupan budaya bangsa. Itu berarti pula demokratisasi kehidupan budaya di Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari kedudukan dilematis seperti yang diungkapkan Dahl di atas, yaitu antara otonomi dan kontrol.

Akan tetapi, masalah yang paling relevan dibahas di sini ialah sejauh mana kontrol itu

dilakukan. Apakah hanya oleh pemerintah dalam pengertian yang sempit (para aparat saja), ataukah juga melibatkan masyarakat itu sendiri? Dua pertanyaan yang lebih penting lagi adalah: sistem dan kategori apa yang dipergunakan untuk melakukan kontrol tersebut? Sejauh mana pula sistem dan kategori itu harus mendapatkan legitimasi dari masyarakat sebagai sesuatu yang dianggap sah serta dihayati bersama, pun merupakan pertanyaan yang cukup menarik.

Seperti disinggung di muka, pengertian kebudayaan yang beraneka ragam itu dapat mendorong kerawanan, apabila tidak didudukkan dalam konteks pembicaraan yang jelas.

Oleh karena itu, suatu pengertian (definisi) budaya yang operasional dibutuhkan untuk memberikan arti dan kaitan yang fungsional terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Untuk maksud tersebut definisi sederhana di bawah ini mungkin memadai. Kebudayaan adalah hasil upaya yang terus-menerus dari manusia di dalam -- *ikat-an* -- masyarakat dalam menciptakan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk menjawab tantangan kehidupannya (cf. Kayam, 1988:225). Dari segi kognitif, kebudayaan tidak hanya mencakup apa yang dilakukan dan diciptakan manusia, tetapi juga apa yang masih dicita-citakan atau yang masih harus diwujudkan, termasuk norma, pandangan hidup dan sistem nilai. Yang pertama dapat disebut kategori faktisitas dan yang kedua kategori norma (Kleiden, 1988: 233).

Dalam kaitan ini setidaknya ada dua fungsi kebudayaan nasional yang patut dikemukakan. Pertama, sebagai pedoman dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa bagi masyarakat majemuk Indonesia. Kedua, sebagai pedoman dalam pengam-

bilalihan ilmu dan teknologi modern. Dari kedua fungsi tersebut kiranya jelas bahwa secara fungsional kebudayaan itu merupakan *instrument* (alat) dalam kehidupan masyarakat. Namun sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan dapat dianggap sekaligus sebagai alat (patokan) dan tujuan.

Agar kebudayaan nasional dapat berfungsi seperti ditekankan di atas, diperlukan sistem demokratisasi dalam kehidupan masyarakat. Melalui proses demokratisasi ini diharapkan akan tercipta perluasan dan penyempurnaan kelembagaan sosial yang tangguh, agar mampu menghadapi perubahan-perubahan dan perluasan lingkungan interaksi sosial. Perluasan interaksi sosial adalah sangat erat kaitannya dengan rekayasa norma dan nilai-nilai budaya tradisional maupun modern untuk menopang perluasan bentuk-bentuk hubungan sosial baru yang kemudian dapat dilembagakan. Lembaga-lembaga ini diharapkan mampu mengaktualisasikan aspirasi yang berkembang. Seperti dalam bidang kehidupan ekonomi, nilai-nilai baru diharapkan tidak hanya akan memperluas jaringan kelembagaan ekonomi melintasi batas lingkungan geografis, dan sosial-budaya, tetapi juga akan merangsang persaingan, disiplin, peningkatan produktivitas kerja yang berorientasi ke pasar, serta penguasaan peralatan dan teknologi yang memadai.

Proses demokratisasi dengan demikian akan mengembangkan perangkat sistem nilai budaya dan norma-norma sosial dan melembagakannya dalam berbagai lapangan kehidupan yang baru, untuk mendukung alih ilmu dan teknologi modern. Secara demikian, demokratisasi sebagai sistem akan memberikan kebebasan kepada manusianya memilih nilai-nilai yang menjadi motivasi,

pendorong, pembentuk sikap, dan sekaligus tujuan dari tindakannya. Oleh karena nilai-nilai ini terkait erat dalam unsur-unsur (*traits*) budaya, maka dalam mengadopsi suatu unsur budaya orang tidak akan dapat melepaskan nilai-nilai yang melekat pada unsur budaya itu. Seperti pada unsur budaya teknologi modern, nilai-nilai seperti rasionalitas, ketelitian, ketekunan, disiplin dan efisiensi harus turut serta diambil alih. Atau sebaliknya, dengan mengembangkan sederetan nilai-nilai tadi dari khasanah budaya sendiri, orang dengan mudah dapat mengadopsi unsur-unsur budaya teknologi modern. Begitu juga kita tidak akan mungkin mengadopsi sistem manajemen perusahaan Barat apabila nilai-nilai seperti keterbukaan, objektivitas, dan *fairness*, (ketulusan dan keadilan) tidak mampu kita adopsi.

Dapat dimaklumi bahwa alih ilmu dan teknologi itu bukan suatu masalah teknis, melainkan suatu proses enkulturasasi (pembudayaan). Dengan analogi yang sederhana, bagaimana secara selektif "mencangkokkan" juga nilai-nilai budaya baru yang mendukungnya ke dalam batang tubuh budaya kita. Nilai-nilai baru itu diharapkan akan dapat tumbuh dengan akar budaya kita sendiri. Dengan demikian buah hasilnya adalah "khas" kita sendiri. Oleh karena nilai-nilai budaya baru itu dipilih secara selektif agar dia dapat berfungsi sebagai faktor inovatif (pembaru) dan bukan sebagai pembusuk yang dominatif dalam budaya kita, maka enkulturasasi ini merupakan upaya rekayasa sosial.

Rekayasa sosial dalam pembangunan ekonomi adalah sama pentingnya dengan pertimbangan teknik dan keuangan. Rekayasa yang tepat secara ekonomi akan memberikan keuntungan dua kali lipat dibanding pembangunan ekonomi melalui rekayasa

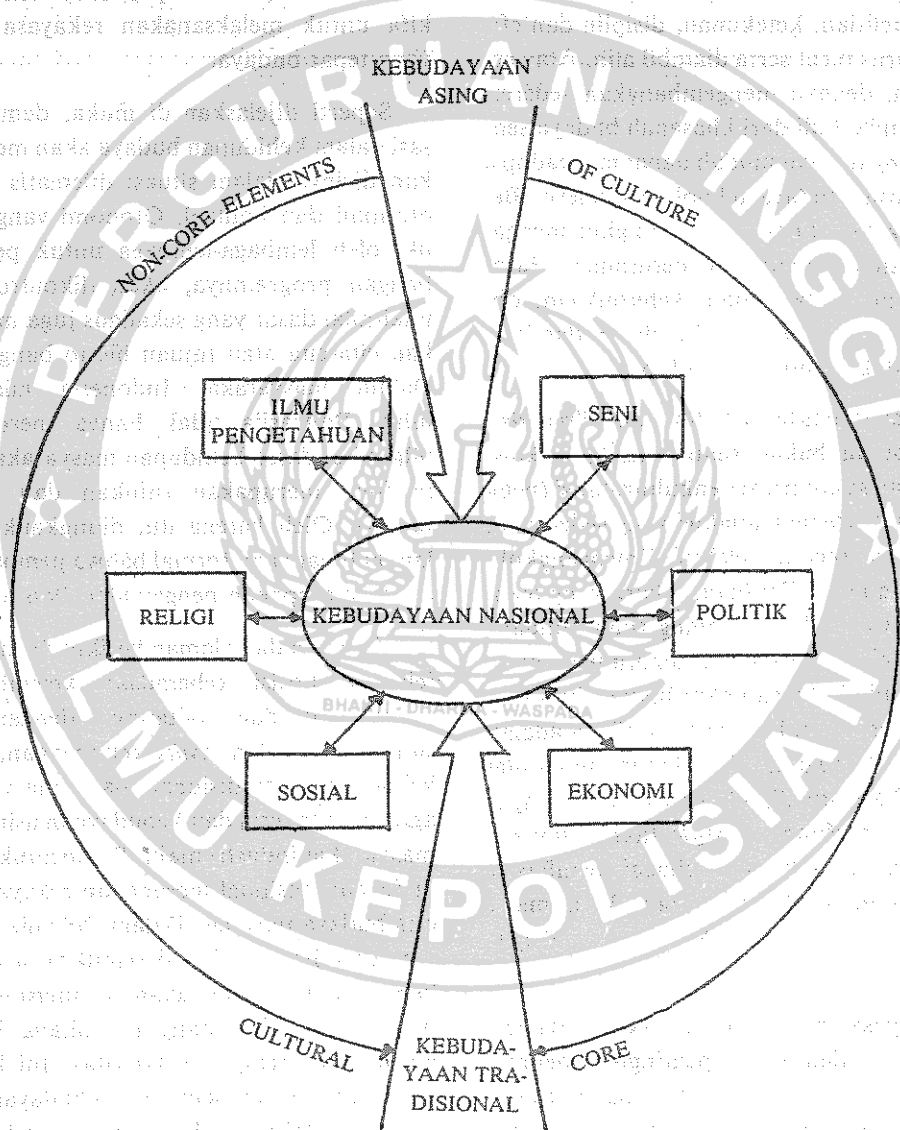
yang tidak tepat guna. Kegagalan berbagai proyek pembangunan berskala besar seperti proyek irigasi di Etiopia, proyek peternakan sapi di Papua Nugini, dan proyek pengawetan tembakau di Tanzania, adalah contoh rekayasa sosial yang secara budaya tidak tepat. Sebab itu jelas bahwa demokratisasi dalam kehidupan budaya, harus mendorong kita untuk melaksanakan rekayasa sosial yang tepat budaya.

Seperti dijelaskan di muka, demokratisasi dalam kehidupan budaya akan menemukan dirinya dalam situasi dilematis antara otonomi dan kontrol. Otonomi yang dimiliki oleh lembaga-lembaga untuk pengembangan programnya, akan dikontrol oleh nilai-nilai dasar yang sekaligus juga merupakan cita-cita atau tujuan hidup bangsa itu. Dalam masyarakat Indonesia nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya merupakan nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat tetapi juga merupakan rujukan dan tujuan bangsa. Oleh karena itu, diungkapkan dalam kalimat yang formal bahwa pembangunan itu merupakan pengamalan Pancasila.

Skema pada halaman berikut dapat menjelaskan posisi keberadaan kelembagaan masyarakat dan kaitannya dengan dua sumber nilai dan *traits* kebudayaan, yaitu kebudayaan tradisional dari masyarakat agraris Indonesia dan kebudayaan asing dari masyarakat industri maju. Pembentukan kebudayaan nasional merupakan rekayasa kedua budaya tersebut. Dalam Polemik Kebudayaan tahun 1930an dikemukakan bahwa kebudayaan nasional akan berfungsi sebagai pemberi identitas bangsa, wahana komunikasi, dan penguat solidaritas. Ini berarti dalam proses pembentukan kebudayaan nasional, nilai-nilai kehidupan tradisional bangsa Indonesia harus dominan atau lebih unggul daripada nilai-nilai kebudayaan

asing. Dengan demikian, pembentukan atau pertumbuhan lembaga dalam keenam lapangan kehidupan (yang diadopsi dari Edward Spranger) yaitu religi, bahasa, seni, politik, ekonomi, dan sosial, secara dominan akan diwarnai dan dijiwai oleh nilai-nilai tradisional bangsa Indonesia.

Mungkin pertanyaan yang relevan di sini ialah apakah kebebasan dalam rangka demokratisasi kehidupan budaya, perorangan atau lembaga, dalam keenam lapangan hidup itu akan mengadopsi nilai-nilai atau traits budaya asing secara selektif atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ter-



MODEL MEKANISME DEMOKRATISASI KEBUDAYAAN

tentu "menelannya" bulat-bulat.

Diskusi pra Kongres Kebudayaan Nasional di Jakarta pada 8-10 Maret 1990 telah mengidentifikasi sebanyak 24 masalah kebudayaan asing. Di antaranya terdapat 10 masalah yang merupakan tantangan dalam pembentukan kebudayaan nasional yaitu: (1) masalah komersialisasi kebudayaan; (2) masalah konsumerisme dan materialisme; (3) masalah ketahanan budaya dan konflik nilai; (5) masalah pendidikan dan penerusan nilai; (6) masalah adaptasi hukum dalam pengembangan pariwisata; (7) masalah seks dan kesehatan; (8) masalah sekularisasi kehidupan beragama; (9) masalah pengembangan potensi masyarakat dalam upaya mengambil manfaat optimal dari pariwisata dan interaksi antar bangsa; dan (10) masalah pengembangan kemampuan selektif terhadap pengaruh kebudayaan asing.

Di samping itu, telah diidentifikasi pula potensi positif kebudayaan asing untuk pengembangan kebudayaan nasional seperti: (1) Pengayaan dalam kehidupan seni musik, lukis, busana, sastra, drama, dll.; (2) mendorong dan memberi pola pada sistem pendidikan; (3) mengidentifikasi nilai-nilai universal untuk memberi bobot progresivitas terhadap kebudayaan tradisional; (4) memperluas wawasan pikiran dan pengembangan hubungan antar bangsa; dan (5) mendorong sikap dan perilaku kemandirian yang sudah berakar pada kebudayaan lokal.

Kemampuan kita menjawab tantangan dan sekaligus memanfaatkan unsur-unsur positif kebudayaan asing di atas sangat ditentukan oleh seberapa jauh penghayatan dan penguasaan terhadap norma dan nilai-nilai fundamental bangsa kita sendiri. Nilai-nilai fundamental ini dalam antropologi disebut inti budaya (*cultural core*). *Cultural*

core ini berperan tidak saja sebagai rujukan dan kontrol, melainkan juga sebagai objek pengayaan karena sifatnya yang terbuka dan dinamis terhadap pengaruh kebudayaan luar (asing) yang merupakan "non-core elements of culture". Pancasila sebagai nilai-nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara telah dinyatakan sebagai identitas yang terbuka. Keterbukaan di sini mengacu kepada pengayaan dalam pengalaman, sehingga nilai-nilai itu tidak hanya dapat disesuaikan secara fungsional dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi dari waktu ke waktu, tetapi juga secara demikian nilai-nilai itu akan menjadi lebih pragmatis dan aktual dalam kehidupan. Dengan demikian nilai-nilai itu terhindar dari proses isolatif dan pengerdilan (*imbreding*).

Pada hakikatnya inilah yang diharapkan dari proses demokratisasi. Suatu kebebasan dalam keterbukaan untuk melakukan restrukturisasi dan re-interpretasi nilai-nilai dan unsur-unsur budaya dalam pengayaan (rekayasa) terhadap nilai-nilai asing secara selektif. Dan kemudian melembagakannya dalam kehidupan modern.

Di samping itu juga dari arus bawah, tidak semua unsur budaya tradisional yang berasal dari berbagai budaya etnis dan lokal secara otomatis merupakan kebudayaan nasional. Hanya puncak-puncak kebudayaan etnis dan lokal yang dapat dijadikan "modal" kebudayaan nasional. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 32 UUD '45 yang menyatakan: "... Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa ...". Diskusi pra Kongres Kebudayaan Nasional bulan Maret 1990 tersebut telah merumuskan puncak-puncak kebudayaan daerah dan indikatornya.

"Puncak-puncak kebudayaan di daerah adalah sari-sari dari kebudayaan suku bangsa dan lokal setempat yang berkualitas tinggi, dinamik dan menggambarkan identitas pendukungnya menjadi modal dasar pembangunan Kebudayaan Nasional Indonesia."

Adapun indikator puncak-puncak kebudayaan di daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengandung nilai-nilai luhur Pancasila.
2. Mencerminkan kualitas, martabat, dan peradaban bangsa.
3. Merupakan kebanggaan nasional.
4. Terbuka untuk pengayaan, penyempurnaan, dan peningkatan kualitas sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan masyarakat.
5. Komunikatif, karena dapat dihayati oleh pendukung kebudayaan daerah lainnya.
6. Menuju tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Sebagai ungkapan identitas keindonesiaan.

Secara demikian nilai-nilai dan unsur-unsur dari kebudayaan tradisional memerlukan berbagai proses pematangan (reinterpretasi, reaktualisasi dan rekonstruksi) dan pengayaan agar memenuhi ketujuh kategori di atas untuk dapat tampil sebagai puncak kebudayaan daerah. Puncak-puncak kebudayaan daerah ini merupakan modal kebudayaan nasional.

Demokratisasi dalam kehidupan budaya tradisional sangat diperlukan guna mendorong dan memacu masing-masing daerah atau kelompok etnis memberikan saham (modal) bagi pengembangan kebudayaan nasional. Proses demokratisasi ini juga akan menimbulkan suasana gairah dan kompetitif yang terbuka dan saling mengisi. Suasana ini akan mendorong perubahan sosial-budaya secara menyeluruh.

Setidaknya ada dua proses demokratisasi dan seleksi (*control*) dalam pembentukan kebudayaan nasional. Pertama ialah pada proses adopsi terhadap nilai-nilai dan unsur-unsur kebudayaan asing, sedangkan kedua pada proses penampilan unsur-unsur kebudayaan tradisional. Kedua proses demokratisasi dan seleksi ini seharusnya telah terjadi sebelum nilai dan unsur-unsur budaya tersebut dilembagakan dalam keenam lapangan hidup. Tetapi karena prosesnya adalah sangat kompleks dan tidak berjalan *linear* maka dapat juga terjadi dalam berbagai bentuk modifikasi dan perubahan pada tingkat implikasinya di lapangan.

Maka itu, demokratisasi sebagai sistem kehidupan budaya dengan substansinya kebebasan dan otonomi sekaligus terkontrol oleh nilai-nilai rujukan yang fundamental dan teruji dalam pengamalan. Pada gilirannya, proses demokratisasi dalam kehidupan budaya dapat mendorong transformasi sosial lebih cepat. Akan tetapi, perubahan-perubahan sosial-budaya pada hakikatnya tidak dapat dilakukan secara revolusioner, sebagaimana yang dikehendaki, umpamanya oleh pembangunan ekonomi.

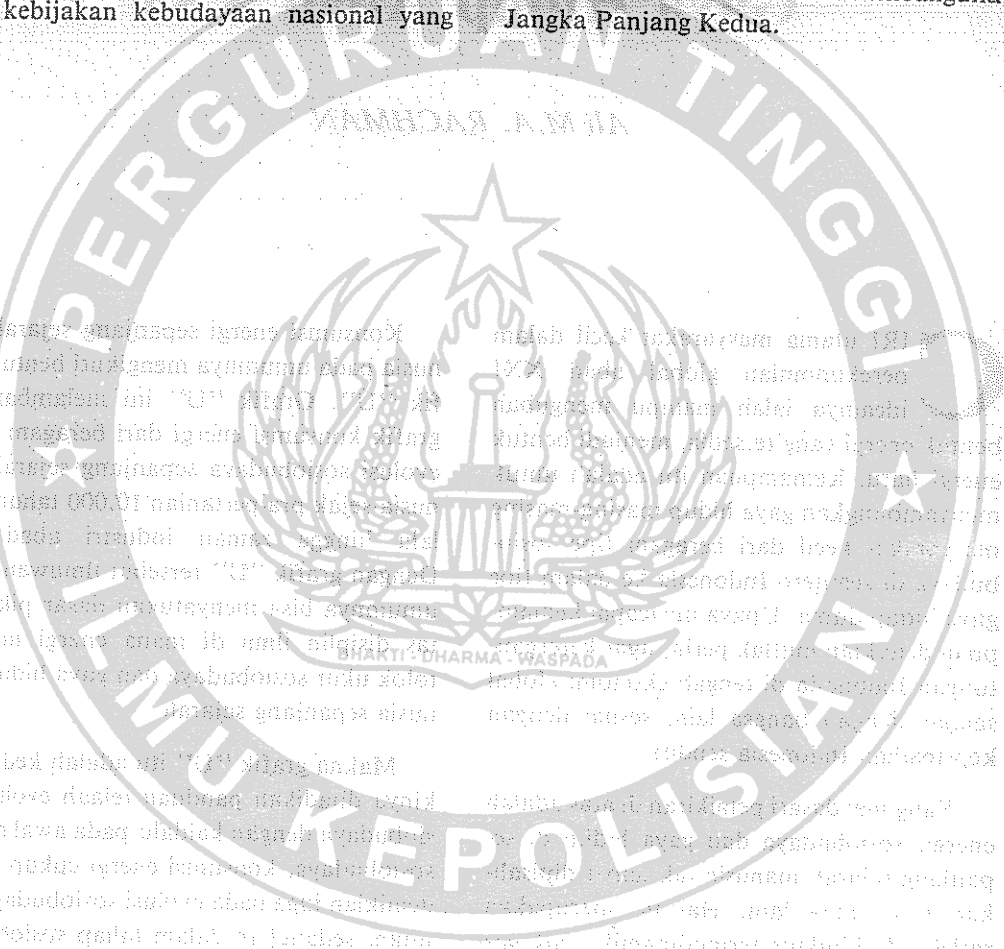
Oleh karena itu, pembangunan ekonomi justru tidak jarang berjalan tanpa menghiraukan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Barangkali pembangunan seperti ini dari segi ekonomi masih tetap menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Tetapi, dari segi sosial dampaknya adalah sangat fatal. Pembangunan ekonomi demikian hanya akan melahirkan ketimpangan dan kesenjangan sosial, yang pada akhirnya mengancam solidaritas dan kesatuan nasional.

Barangkali benar pendapat Heilbroner (1966), ahli ekonomi kenamaan, bahwa pembangunan di Dunia Ketiga bukanlah terutama pembangunan ekonomi melainkan

proses pembangunan politik dan sosial budaya.

Untuk mempercepat proses pembangunan nasional, demokratisasi dalam kehidupan budaya terasa mutlak diperlukan. Maka itu telah saatnya, kita memiliki suatu konsep dan kebijakan kebudayaan nasional yang

terintegrasi dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial lainnya. Secara demikian, pembangunan tidak akan kehilangan dimensi yang penting dalam meningkatkan kualitas dan martabat bangsa, yaitu dimensi budaya. Begitu pula diharapkan tugas kembar yang bersejarah itu akan dapat dilaksanakan lebih sempurna dalam era Pembangunan Jangka Panjang Kedua.



...dalam kehidupan politik dan sosial budaya. Untuk mempercepat proses pembangunan nasional, demokratisasi dalam kehidupan budaya terasa mutlak diperlukan. Maka itu telah saatnya, kita memiliki suatu konsep dan kebijakan kebudayaan nasional yang terintegrasi dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial lainnya. Secara demikian, pembangunan tidak akan kehilangan dimensi yang penting dalam meningkatkan kualitas dan martabat bangsa, yaitu dimensi budaya. Begitu pula diharapkan tugas kembar yang bersejarah itu akan dapat dilaksanakan lebih sempurna dalam era Pembangunan Jangka Panjang Kedua.

...dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial lainnya. Secara demikian, pembangunan tidak akan kehilangan dimensi yang penting dalam meningkatkan kualitas dan martabat bangsa, yaitu dimensi budaya. Begitu pula diharapkan tugas kembar yang bersejarah itu akan dapat dilaksanakan lebih sempurna dalam era Pembangunan Jangka Panjang Kedua.